

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo**

Oleh:

HAMDAN MALOWA

NIM : 271 413 048

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Januari 2018

Jam : 09.00-10.00 WITA

Pembimbing I

Pembimbing II



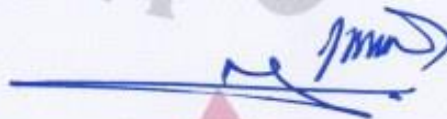
Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH
Nip. 195406251981021001



Zamroni Abdussamad, SH., MH
Nip. 197007122003121002

Gorontalo, 18 Januari 2018

**Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP. 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo**

Oleh:

HAMDAN MALOWA
NIM. 271 413 048

Telah dipertahankan dihadapan penguji pada

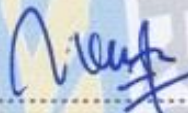
Hari/Tanggal : Kamis, 18 Januari 2018

Jam : 09.00-10.00 WITA

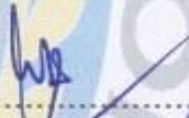
1. Hj. NIRWAN JUNUS, SH., MH
NIP. 196906022000032001


(.....)

2. MELLISA TOWADI, SH., MH
NIP. 198908092016071001


(.....)

3. Prof. Dr. JOHAN JASIN, SH., MH
NIP. 195406251981021001


(.....)

4. ZAMRONI ABDUSSAMAD, SH., MH
NIP. 197007122003121002


(.....)

Gorontalo, 18 Januari 2018

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum




Moh. R. U. Paluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 197011051997031001

ABSTRAK

HAMDAN MALOWA (271413048), Tinjauan Yuridis Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH sebagai pembimbing I dan Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH sebagai pembimbing II.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo. Penelitian dilaksanakan di kota Gorontalo yaitu pada kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan terhadap data primer yang merupakan hasil wawancara dengan pihak Bawaslu yang tergabung dalam Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Gorontalo dan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Bawaslu Provinsi Gorontalo yaitu dengan upaya represif yang diselesaikan dengan prosedur hingga tingkat pengadilan seperti kasus pelanggaran kode etik Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui putusan dengan Pengaduan Nomor 186/I-P/L-DKPP/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 88/DKPP-PKE-IV/2015. Bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo adalah telah bertindak tidak profesional yakni menyalahgunakan tugas, wewenang, dan jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo hal ini telah melanggar sumpah/janji jabatannya sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dari tulisan ini penulis berkesimpulan bahwa keberadaan DKPP adalah untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja Bawaslu serta jajarannya sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan Pemilu.

Kata Kunci ; Peran, Pelanggaran, Kode Etik.

ABSTRACT

MALOWA, HAMDAN. (271413048). Juridical Review on The Role of the Election Organizing Council (DKPP) in the Settlement of Violations of the Code of Ethics of the Election Supervisory Board (Bawaslu), Gorontalo Province. Principal Supervisor: Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH. Co-supervisor: Zamroni Abdussamad, SH., MH.

This undergraduate thesis discusses the juridical review the role of the Election Organizing Council (henceforth called as DKPP) in the settlement of violations of the code of ethics of the Election Supervisory Board (henceforth called as Bawaslu), Gorontalo Province. This field study was conducted at Bawaslu Office, Gorontalo city. The primary data consisted of the interview results with Bawaslu officers who are also working as Local Inspection Team (*Tim Pemeriksa Daerah*), Gorontalo Province; these data were also collected from library research.

The result shows that in settlement of violations of the code ethics of Bawaslu, DKPP attempts to employ repressive efforts which also involves the court, such as the case of code ethics violation of Bawaslu, Gorontalo Province, through a decree with Complain Number 186 / I-P / L-DKPP / 2015 Date 27 October 2015 registered with Case Number 88 / DKPP-PKE-IV / 2015. The example of the violation of the code of ethics is that abusing the duty, authority, and position as chairman and / or member of Bawaslu Gorontalo. It has violated the oath/pledge of the person's position as the organizer of the election as specifically regulated in Article 7 paragraph (3) of the Regulation of the Honorary Board of the Election Organizer Number 2 of 2017 concerning the Code of Conduct of the General Election Organizing Committee. In conclusion, DKPP is responsible for balancing and monitoring Bawaslu to improve the conduct of the election.

Keywords: Roles, Violations, Code Ethics

